



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD SYAMSU IQBAL
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 445711

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.510.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/50 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 141.500.000		
2. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000		
3. Tanah Seluas 906 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.140.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/50 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 41.500.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/30 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 40.500.000		
6. Tanah Seluas 1.018 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 80.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	98.000.000
1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	73.550.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	163.151.358



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.844.701.358

III. HUTANG

Rp. 39.583.367

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.805.117.991

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.